

DAFTAR PERMASALAHAN USULAN PEMBERHENTIAN PNS DENGAN HAK PENSIUN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU

NO.	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1.	Keabsahan dokumen	Dokumen tidak dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. Contoh Surat akte nikah, dilegalisir oleh kepala subbagian umum dan kepegawaian.
2.	Kesalahan Pengisian perhitungan MKG, MKP dan Masa Kerja PNS DPCP	Diisi sesuai dengan contoh perhitungan sebagaimana terlampir;
3.	Kesalahan pengisian data keterangan keluarga DPCP	<p>a. Data istri, apabila memiliki istri lebih dari satu yang sah secara hukum, maka identitas data istri diisi, dengan mencantumkan keterangan istri ke-1, ke-2, dst dan juga melampirkan dokumen pendukung berupa surat nikah, cerai/kematian istri ke-1, ke-2, dst;</p> <p>b. Data anak yang dimasukkan dalam data keterangan keluarga adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) belum berusia 25 tahun; 2) belum bekerja; 3) belum/pernah menikah.
4.	Kesalahan Pengisian SKP	<p>a. Identitas Pejabat penilai dan Atasan pejabat penilai, tidak diisi dengan sebagaimana mestinya;</p> <p>b. Tanggal penetapan SKP, Penilaian SKP, dan Penilaian Prestasi Kerja tidak diisi dengan sebagaimana mestinya;</p> <p>c. Unsur kepemimpinan seharusnya tidak diisi untuk PNS yang menduduki jabatan pelaksana dan jabatan fungsional.</p>
5.	Perbedaan data Nama dan Tanggal Lahir PNS antara Data Kepegawaian dengan Data Kependudukan	Lampirkan Surat Klarifikasi Perbedaan Nama dan Tanggal Lahir dari pejabat yang berwenang (Kantor Camat atau Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil)
6.	Perbedaan data Nama antara Data Kepegawaian dengan Data Kependudukan PNS Ayah/Ibu pada akte kelahiran anak	Lampirkan Surat Klarifikasi Perbedaan Nama dan Tanggal Lahir dari pejabat yang berwenang (Kantor Camat atau Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil)
7.	Perbedaan data Nama dan Tanggal Lahir PNS antara Data Kepegawaian dengan Data pada Akte Nikah	Lampirkan Surat Klarifikasi Perbedaan Nama dan Tanggal Lahir dari pejabat yang berwenang (Kantor Urusan Agama atau Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil)
8.	Perbedaan data Nama dan Tanggal Lahir PNS dan Suami/Istri antara Data Kependudukan dengan Data pada Akte Nikah	Lampirkan Surat Klarifikasi Perbedaan Nama dan Tanggal Lahir dari pejabat yang berwenang (Kantor Urusan Agama atau Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil)